BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah sebuah negara kepulauan yang terdiri atas 5 pulau besar dan 17.000 ribu pulau pulau kecil dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta yang tersebar di antaranya. Jumlah penduduk yang banyak dan jangkauan wilayah yang amat sangat luas ini tentunya menimbulkan tidak sedikit tantangan dalam segi pemerataan dan pembangunan perekonomian Negara terutama di bidang keuangan atau finansial.

Jumlah populasi individu yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan atau yang disebut juga *unbanked population*, merupakan jumlah yang harus terus diturunkan untuk meningkatkan *financial inclusion*. *Financial inclusion* merupakan salah satu prioritas yang terus ditingkatkan di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Menurut Booklet Financial Inclusion yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, *financial inclusion* adalah hak tiap-tiap individu untuk memiliki dan mendapatkan akses ke layanan keuangan berkualitas dengan efisien, mudah, informatif dan biaya terjangkau.

Financial inclusion merupakan perluasan dalam mengakses dan menggunakan produk dan jasa keuangan seperti tabungan, asuransi, kredit, pembayaran dan pengiriman uang ke sejumlah orang. Financial inclusion menjadi strategi intervensi yang berupaya untuk mengurangi ketimpangan pada ekonomi yang menghambat orang miskin dan kurang mampu untuk mendapat akses ekonomi (Mindra & Moya, 2017).

Sistem pelayanan finansial yang terus berkembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif didorong oleh perkembangan internet dan teknologi yang semakin maju. Perkembangan tersebut merupakan hasil inovasi dari pengembangan produk dan teknologi yang menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Kini pelayanan perbankan tidak hanya dapat didapatkan melalui institusi seperti perbankan konvensional namun juga bisa didapatkan melalui banyaknya startup financial technology yang semakin berkembang pesat dan terus berusaha memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat. Perkembangan produk mobile

money yang pesat, pertumbuhan perbankan yang kian besar dan gerakan pemerintah yang mendorong pembayaran melalui akun keuangan yang resmi, semuanya menawarkan potensi yang dapat dengan signifikan merubah cara masyarakat mengatur keuangan mereka. Memiliki sebuah rekening bank merupakan sebuah gerbang menuju servis finansial lainnya, seperti menabung dan meminjam uang.

Namun meskipun pihak bank dan penyedia layanan finansial lainnya terus menerus melakukan pengembangan dalam pelayanannya dan mendorong masyarakat untuk bertransaksi finansial melalui institusi finansial, jumlah *unbanked population* masih sangat banyak. Secara global, terdapat sebanyak 1.7 milyar penduduk dewasa yang tidak memiliki rekening di institusi keuangan manapun ataupun melalui aplikasi finansial *handphone* yang paling mudah diakses (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar & Hess, 2018)

Berdasarkan data Global Financial Index yang dirilis oleh World Bank atau Bank Dunia pada April 2018, Indonesia ialah negara yang memiliki kemajuan paling pesat di antara negara Asia Tenggara dalam *financial inclusion*. Di Indonesia, angka persentase kepemilikan rekening meningkat dengan signifikan dari 13% di tahun 2014 menjadi 49% di tahun 2017. Meskipun Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat untuk angka kepemilikan rekening, namun angka itu masih terbilang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepemilikan rekening secara global yang mencapai angka 69%. Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara yang perekonomiannya merupakan penyumbang angka populasi *unbanked* terbanyak di dunia dengan presentase nilai sebesar 6%. Urutan pertama negara dengan *unbanked population* terbanyak ditempati oleh China dengan presentase 13%, diikuti oleh India di posisi kedua dengan presentase *unbanked population* sebesar 11%, dan yang ketiga ditempati oleh Pakistan dengan presentase yang sama dengan Indonesia yakni 6% (Demirguc-Kunt *et al.*, 2018).

Pelaksanaan survei nasional mengenai penetrasi pengguna internet yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 171.17 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, angka tersebut menunjukkan bahwa

sebesar 64.8% dari total penduduk Indonesia sudah menggunakan jasa internet. Namun presentase masyarakat yang alasan utamanya menggunakan internet untuk melakukan transaksi transfer uang dan membayar tagihan secara secara *online* hanyalah sebesar 0.2 % dari total keseluruhan, sehingga dapat diketahui bahwa dari seluruh pemakai internet di Indonesia, hanya sebagian kecil saja yang memanfaatkan internet untuk melakukan transaksi finansial.

Hal ini membuktikan bahwa meskipun teknologi dan informasi melalui internet kini sudah dapat diakses dengan mudah, namun kurangnya kepedulian masyarakat dengan fitur dan pelayanan finansial yang disediakan membuat tingkat pemanfaatan internet sebagai media untuk melakukan transaksi finansial masih rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat *financial inclusion* yang masih rendah. Contohnya seperti seseorang yang telah memiliki rekening bank namun tidak pernah dimanfaatkan dengan maksimal, hanya dibiarkan begitu saja.

Kemampuan atau ketidakmampuan individu untuk mengakses jasa keuangan yang formal secara sukarela maupun terpaksa diidentifikasi sebagai kunci untuk perkembangan sosial-ekonomi pada negara berkembang (Mindra & Moya, 2017). *Financial inclusion* saja tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun *financial inclusion* mengkontribusikan kuota terhadap pertumbuhan ekonomi (Efobi, Beecroft, & Osabuohien, 2014).

Financial inclusion merupakan salah satu faktor dalam pengurangan kemiskinan dikarenakan financial inclusion mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan pinjaman yang membantu rakyat dalam memperlancar konsumsi mereka dan melindungi mereka dari jumlah kerentanan yang ada dalam hidup (Munyegera & Matsumoto, 2016). Financial inclusion membuka pintu bagi masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman kredit yang tidak dapat mereka kumpulkan dari tabungan biasa (Efobi et al., 2014).

Peneliti menemukan bahwa *financial literacy* merupakan faktor penting yang mempengaruhi *financial inclusion* terutama diantara masyarakat dengan pendapatan rendah yang pengetahuan dan kemampuan finansialnya kurang. Sehingga *financial literacy* yang terbatas menjadi hambatan untuk memanfaatkan layanan finansial yang sudah tersedia karena ketidakpahaman mengenai cara memanfaatkannya (Bongomin *et al.*, 2018).

Wardhono, Qori'Ah, dan Indrawati, (2016) mengemukakan *financial inclusion* telah menjadi program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melawan kemiskinan. Namun masyrakat masih memiliki akses terbatas terhadap akses finansial dikarenakan rendahnya tingkat *financial literacy* dan keterbatasan informasi publik (Wardhono *et al.*, 2016).

Financial literacy dikonklusikan sebagai faktor yang dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan finansial dan membantu kalangan miskin untuk mengatur permasalahan finansial mereka. Oleh karena itu rumah tangga miskin dengan tingkat *financial literacy* yang baik dipercaya berada di tingkat perekonomian yang lebih baik dibanding yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam membuat keputusan finansial (Bongomin *et al.*, 2017).

Infrastructure dianggap menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi suksesnya financial inclusion (Bayero, 2015). Physical infrastructure seperti kondisi jalan yang akan ditempuh menuju bank, jarak yang akan ditempuh, akses mengenai informasi mempengaruhi financial inclusion (Roy, Singh, & Singh, 2017). Infrastructure seperti jalan, telepon, koneksi internet membentuk financial inclusion yang lebih baik (Nanda, 2018).

Mobile money yang merupakan inovasi baru pada sektor keuangan, diharapkan untuk dapat menjadi penghubung antara jarak yang ada dalam mengakses financial services agar terjadi peningkatan dalam bidang sosial-ekonomi di banyak negara berkembang. Mobile money menjadi alternatif yang cukup murah dan praktis didalam lingkup keluarga dan pertemanan untuk melakukan transaksi finansial dalam bentuk pengiriman uang terutama di daerah pedesaan atau pedalaman yang akses ke institusi keuangan resmi seperti bank sangat minim atau bahkan tidak ada (Munyegera & Matsumoto, 2016).

Pertumbuhan *mobile money* yang pesat terutama di pasar yang berkembang dikarenakan ekspansi kepemilikan *handphone* yang tinggi dan kurangnya pilihan alternatif murah lainnya (Munyegera & Matsumoto, 2016). *Mobile money* memberikan pertumbuhan keefisiensian yang signifikan dibandingkan dengan cara transfer uang yang konvensional karena *mobile money* menghemat waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan, meningkatkan kepraktisan dan kemananan (Lashitew *et al.*, 2019).

Fokus *financial inclusion* saat ini terbatas pada memastikan bahwa masyarakat dapat mendapatkan akses ke rekening bank tanpa proses yang panjang dan rumit (Nandru, Anand, & Rentala, 2015). Namun memiliki rekening bank saja tidak dianggap sebagai indikator pasti dalam *financial inclusion* karena ada faktor lain yang perlu di pertimbangkan untuk mencapai *financial inclusion*. Ditemukan bahwa tingkat *financial inclusion* yang tinggi diasosiasikan dengan biaya transaksi bank yang rendah, jarak yang dekat dengan bank dan dokumen yang mudah untuk membuka rekening bank atau yang bisa disebut juga sebagai *ease of banking* (Nandru *et al.*, 2015).

Salah satu indikator penting yang mempengaruhi perilaku finansial yaitu tingkat kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya dalam menghadapi situasi finansial tanpa merasa terbebani (Mindra, Moya, Zuze, & Kodongo, 2017). Financial self efficacy merupakan kemampuan aktual seorang individu dalam menggunakan jasa finansial resmi untuk membuat hidup menjadi lebih baik (Mindra et al., 2017). Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan financial inclusion namun tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap financial inclusion masih rendah. Oleh karena itu untuk meningkatkan financial inclusion, dibutuhkan pemahaman yang jelas bagi masyarakat apa itu financial inclusion dan pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Memiliki sebuah rekening bank merupakan gerbang menuju tercapainya financial inclusion yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dikarenakan masyarakatnya yang memiliki akses berkualitas dan terjangkau dalam keuangan, sehingga penulis memilih masyarakat yang telah memiliki rekening bank sebagai objek penelitian.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari 34 provinsi yang terdapat pada Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 kota yakni Kota Tanjung Pinang yang merupakan ibukota dan Kota Batam, serta 5 kabupaten antara lain Tanjung Balai Karimun, Tarempa, Bintan, Lingga, dan Natuna. Terdapat sejumlah bank yang semuanya dibawahi oleh Bank Indonesia dan diawasi oleh OJK di Kepulauan Riau dengan jumlah bank sesuai dengan yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status Kepemilikan di Kepulauan Riau

Jenis Bank	Jumlah Kantor Bank
Bank Pemerintah	113
Kantor Pusat	
Kantor Cabang	9
Kantor Cabang Pembantu	39
Kantor Kas	65
Bank Pemerintah Daerah	22
Kantor Pusat	
Kantor Cabang	5
Kantor Cabang Pembantu	9
Kantor Kas	8
Bank Swasta Nasional	85
Kantor Pusat	115 11 (115 11 (1
Kantor Cabang	30
Kantor Cabang Pembantu	48
Kantor Kas	7
Bank Asing dan Bank Campuran	- 11
Kantor Pusat	
Kantor Cabang	
Kantor Cabang Pembantu	
Kantor Kas	3
Total Kantor Bank Umum	231

Sumber: Bank Indonesia (2019)

Pada Tabel 1.1 terpapar data jumlah kantor bank umum berdasarkan status kepemilikan di Kepulauan Riau, dimana sebanyak 113 kantor bank di Kepulauan Riau merupakan bank pemerintah, 22 kantor bank merupakan bank pemerintah daerah, 85 kantor bank merupakan bank swasta nasional dan 11 kantor bank lainnya merupakan bank asing dan bank campuran.

Tabel 1.2 Posisi Dana Masyarakat (milyar rupiah) yang Dihimpun oleh Bank di Provinsi Kepulauan Riau, Juli 2019-September 2019

Keterangan	Juli 2019	Agustus 2019	September 2019
Giro	13.086,29	12.681,51	14.028,74
Tabungan	23.139,96	23.370,38	23.276,88
Deposito	19.307,76	19.202,18	19.311,68

Sumber: Bank Indonesia (2019)

Tabel 1.3 Posisi Dana Masyarakat (milyar rupiah) yang Dihimpun oleh Bank di Wilayah Kepulauan Riau Lainnya, Juli 2019-September 2019

Keterangan	Juli 2019	Agustus 2019	September 2019
Giro	2.886,8	2.468,03	3.185,64
Tabungan	6.052,76	6.012,04	5.934,75
Deposito	4.327,09	4.478,89	4.600,39

Sumber: Bank Indonesia (2019)

Tabel 1.4 Posisi Dana Masyarakat (milyar rupiah) yang Dihimpun oleh Bank di

Juli 2019	Agustus 2019	Septemb
Kota Batam, Juli 20)19-September 2019	

Keterangan	Juli 2019	Agustus 2019	September 2019
Giro	10.199,49	10.213,48	10.843,10
Tabungan	17.087,20	17.358,34	17.342,13
Deposito	14.980,67	14.723,29	14.711,29

Sumber: Bank Indonesia (2019)

Dari ketiga tabel diatas yang menunjukkan data posisi dana masyarakat yang dihimpun oleh bank yang terdapat di Kepulauan Riau pada periode Juli 2019-September 2019, terlihat bahwa Kota Batam merupakan kota penghimpun dana tabungan terbesar di Kepulauan Riau baik dari sisi nilai giro, tabungan, maupun deposito, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Batam dibandingkan kota lainnya.

Pengamatan yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan oleh para ahli sebelumnya, menunjukkan bahwa belum ada penelitian mengenai kombinasi pengaruh faktor financial literacy, financial self efficacy, ease of banking, mobile money dan infrastructure terhadap financial inclusion sehingga muncul minat untuk melaksanakan penelitian yang mampu untuk mengidentifikasi apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi financial inclusion pada masyarakat Batam yang telah memiliki rekening bank dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Inclusion pada Masyarakat Batam yang Memiliki Rekening Bank.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan penguraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas untuk penelitian ini adalah sebagaimana yang tertulis di bawah ini :

- 1. Apakah *financial literacy* berpengaruh positif terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank?
- 2. Apakah *financial self efficacy* berpengaruh positif terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank?
- 3. Apakah *ease of banking* berpengaruh positif terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank?
- 4. Apakah *mobile money* berpengaruh positif terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank?
- 5. Apakah *infrastructure* berpengaruh positif terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1. Mencari tahu dan memahami bagaimana pengaruh *financial literacy* terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank.
- 2. Mencari tahu dan memahami bagaimana pengaruh *financial self efficacy* terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank.
- 3. Mencari tahu dan memahami bagaimana pengaruh *ease of banking* terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank.
- 4. Mencari tahu dan memahami bagaimana pengaruh *mobile money* terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank.
- 5. Mencari tahu dan memahami bagaimana pengaruh *infrastructure* terhadap *financial inclusion* pada masyarakat Batam yang memiliki rekening bank.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Pihak yang dapat menerima manfaat dari dilakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Masyarakat

Penelitian diekspektasikan mampu menyampaikan data atau informasi yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai faktor yang mampu mempengaruhi dan meningkatkan *financial inclusion* serta mendorong masyarakat yang telah memiliki rekening bank untuk mengutilisasikan dengan maksimal fasilitas yang mereka miliki serta dapat memahami faktor apa yang mendorong masyarakat yang sudah memiliki rekening untuk memiliki rekening bank sehingga faktor tersebut dapat diaplikasikan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening atau *unbanked population* menjadi *banked population*.

2. Perbankan

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak perbankan dalam memberikan solusi, melakukan pengembangan teknologi, pengembangan rencana strategi yang sesuai agar dapat melayani kebutuhan nasabah secara maksimal dan mengundang konsumen baru sehingga tingkat *financial inclusion* semakin meningkat.

3. Akademik

Penelitian ini diharapkan menghasilkan referensi atau informasi yang mampu membantu penelitian berikut yang menggunakan *financial inclusion* sebagai referensi penelitian.

1.4 Sistematika Pembahasan

Struktur dan isi dari keseluruhan penelitian ini secara ringkas dipaparkan menjadi lima bab berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Digunakan unuk pemberian informasi mengenai latar belakang masalah, permasalahan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Bagian dari penelitian yang menjelaskan mengenai konsep teoritis yang dimanfaatkan sebagai landasan dalam menyelesaikan masalahmasalah penelitian. Bagian ini lebih fokus dalam membahas literatur-literatur terdahulu yang membahas teori yang relevan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan perumusan hipotesis dalam penelitian ini. BAB III METODE PENELITIAN Digunakan untuk pemaparan tentang rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi operasional variabel yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, serta teknik pengumpulan data yang digunakan, metode dalam melakukan analisis data, dan uji hipotesis. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pemaparan tentang proses dalam menganalisis data primer yang didapatkan dari kuesioner yang telah diisi oleh responden, pengujian mengenai hipotesis hubungan variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI Digunakan sebagai pemaparan terkait kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, keterbatasan yang dialami, dan pemberian rekomendasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.